

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode, pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan proses penelitian. Judul skripsi yang diangkat oleh penulis adalah “Dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa (1978-2006)”. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji skripsi ini adalah menggunakan metode historis dengan pendekatan interdisipliner dan teknik studi literatur. Metode, disebut oleh Hamid dan Madjid (2011, hlm. 40) “...berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti cara atau jalan”. Secara sederhana, metode dapat disimpulkan sebagai cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitian. Menurut Gottschalk (2008 hlm. 39) metode sejarah sendiri adalah “...proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau”. Hugiono dan Poerwantana (1992, hlm. 25) berpendapat metode sejarah “...hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisis kritis saja, melainkan juga meliputi usaha sintesa daripada data yang ada sehingga menjadi penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya”.

Teknik studi literatur adalah teknik yang dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tertulis itu, seperti yang dijelaskan oleh Hugiono dan Poerwantana: (1992, hlm. 31)

“...dapat merupakan bahan yang sengaja dimasukkan untuk bahan sejarah, misalnya: buku-buku lama tentang sejarah, anal, kronik, catatan peristiwa, buku peringatan, buku harian, notulen, resolusi, daftar kepegawaian dan lain-lain. Bahan yang tidak sengaja ditulis untuk bahan-bahan sejarah antara lain, arsip, dan dokumentasi, berita-berita pemerintah, naskah perjanjian, surat kabar, majalah-majalah dan sebagainya”.

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Dengan menggunakan teknik studi literatur yang membahas berbagai sumber tulisan maka akan membantu penulis dalam melakukan kajiannya, terutama karena kajian sejarah memang bertumpu pada sumber-sumber yang ada untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Beberapa pendekatan pun digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Kartodirdjo (1993, hlm. 120) berpendapat “sejarah deskriptif-naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan pelbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Oleh karena objek yang demikian memuat pelbagai aspek atau dimensi permasalahan, maka konsekuensi logis ialah pendekatan yang mampu mengungkapkannya”. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji skripsi ini adalah pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu yang masih satu rumpun dengan ilmu sejarah seperti sosiologi, antropologi, politik dan lain-lain.

Adapun tahapan-tahapan dalam metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. *Heuristik*, atau pengumpulan sumber sejarah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Etnis Tionghoa.
2. *Kritik Sumber*, atau upaya untuk menelaah otentisitas dan kredibilitas dari sumber-sumber yang telah ditemukan. Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut atau biasa disebut kritik eksternal, sedangkan penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah dapat dipercaya atau tidak dikenal dengan kritik internal (Hamid dan Madjid, 2007, hlm. 47-48). Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyeleksi informasi yang benar-benar relevan dalam penelitian.
3. *Interpretasi*, merupakan proses penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah. Dalam proses ini, seorang sejarawan berupaya menghubungkan dan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang didapatkannya.
4. *Historiografi*, atau penulisan ulang sejarah. Dalam hal ini, tulisan yang dihasilkan melalui serangkaian metode sejarah akan disusun secara sistematis menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Proses penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga tahapan, yakni persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan laporan penelitian. Berikut di bawah ini akan dijelaskan ketiga tahapan penelitian tersebut:

### **3.2 Persiapan Penelitian**

#### **3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian**

Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis adalah menentukan tema atau judul permasalahan yang akan dikaji. Penentuan tema tersebut diawali dengan ketertarikan penulis terhadap sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia. Ketertarikan itu bermula ketika pada mata kuliah Sejarah Pendidikan penulis mengkaji sejarah pendidikan Etnis Tionghoa di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan tersebut, banyak hal mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia yang penulis rasa belum dikaji secara mendalam oleh peenliti lokal maupun luar sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai kebijakan Indonesia terhadap Etnis Tionghoa.

Ketertarikan tersebut membuat penulis mencoba mencari dan membaca literatur seperti buku, skripsi, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia. Dari proses tersebut, penulis pun memutuskan untuk mengambil tema pembahasan mengenai status kewarganegaraan Etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, utamanya pada masa Orde Baru.. Penulis pun berkonsultasi dengan ketua Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS), dosen pengampuh mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah (SPKI) mengenai tema tersebut hingga penulis pun mengajukan judul yaitu “Dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa (1978-2006)” kepada ketua TPPS Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

#### **3.2.2 Penyusunan dan Rancangan Penelitian**

Penyusunan proposal penelitian adalah ssyarat awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan penulisan skripsi. Proposal penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun secara sistematis. Penulisan proposal penelitian tersebut dilakukan ketika mengikuti mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah (SPKI). Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang membahas mengenai bagaimana penyusunan proposal hingga skripsi, juga berbagai hal-hal teknis

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

misalnya tata cara penulisan, mengutip, membuat daftar pustaka dan lain sebagainya. Pada saat penulis mengikuti mata kuliah tersebut, penulis mengajukan judul awal yang berbeda dengan judul yang diangkat pada skripsi ini. Proses perkuliahan di kelas pun berjalan lancar dengan setiap mahasiswa bergantian mempresentasikan judul proposal penelitiannya dan mendapatkan kritik serta saran dari dosen maupun mahasiswa lain.

Berbekal kritik dan saran dari dosen dan rekan-rekan, maka penulis pun terus melakukan perbaikan terhadap proposal yang telah penulis presentasikan di kelas. Di akhir mata kuliah tersebut, diselenggarakan seminar proposal pada tanggal 31 Agustus 2016 di hadapan dosen pembimbing yang telah ditentukan TPPS Departemen Pendidikan Sejarah. Dalam seminar tersebut penulis mempresentasikan proposal kepada Bapak Wawan Darmawan, S.Pd. M.Hum sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra. Yeni Kurniawati M.Si sebagai Pembimbing II. Dari seminar tersebut penulis banyak mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan proposal.

Namun ketika proses penulisan skripsi dilakukan, tepatnya ketika penulis mencari sumber yang berkaitan dengan skripsi yang sedang ditulis, sumber utamanya tidak ditemukan. Maka, penulis pun berkonsultasi dengan pembimbing dan ketua ketua Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS). Setelah berkonsultasi, akhirnya diputuskan untuk mengganti judul tersebut dengan “Dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa (1978-2006)”.

### 3.2.3 Mengurus Perizinan

Mengurus perizinan merupakan tahapan yang sangat penting dalam melaksanakan proses penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan sumber di sebuah instansi atau lembaga-lembaga tertentu. Adapun berbagai tahapan yang dilakukan untuk mengurus perizinan tersebut adalah *pertama*, membuat surat pengantar dari jurusan yang telah ditandatangani oleh pembimbing I/II sebagai bukti diizinkan penelitian dilakukan oleh mahasiswa ke suatu lembaga/instansi tertentu. Setelah itu, surat tersebut diserahkan kepada pihak fakultas bagian seksi akademik untuk membuat surat pengantar dari kampus ke instansi atau lembaga yang dituju. Adapun lembaga yang akan dituju oleh penulis adalah Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

### 3.2.4 Bimbingan dan Konsultasi

Sebelum melakukan proses bimbingan, maka tahap awal yang harus dilakukan adalah penunjukan dua calon dosen pembimbing oleh ketua Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS). Berdasarkan hasil seminar yang dilakukan pada 30 Agustus 2016 dan Surat Keputusan No 38/SPKI/TPPS dipilih Bapak Wawan Darmawan, S.Pd. M.Hum sebagai Pembimbing I dan Ibu Yeni Kurniawati S, S.Pd, M.Pd sebagai Pembimbing II.

Bimbingan dan konsultasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan antara penulis dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan maksud untuk mendapatkan kritik, saran maupun masukan yang sifatnya membangun agar proses penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi lebih fokus dan terarah. Proses bimbingan tersebut pada awalnya dilakukan secara rutin dan tatap muka, namun untuk beberapa waktu yang cukup lama, proses bimbingan tidak dilakukan penulis karena terdapat masalah personal yang cukup pelik. Proses bimbingan pun kembali dilaksanakan dengan rutin.

### 3.3 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, penulis melaksanakannya dalam empat tahap yang sesuai dengan langkah-langkah metode penelitian sejarah. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai langkah-langkah tersebut:

#### 3.3.1 Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heurishein*, yang artinya memperoleh (Abdurrahman, 2007, hlm. 64). Kegiatan memperoleh yang dimaksud disini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh sumber sejarah. Hal itu dijelaskan oleh Carrad dan Gee (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 67) bahwa heuristik adalah "...sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah.". Sumber sejarah sendiri bisa berupa berbagai hal, namun menurut jenisnya, sering diklasifikasikan menjadi sumber lisan dan sumber tulisan.

Pada proses heuristik ini, penulis berupaya untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Maka dari itu, diperlukan eksplorasi ke beberapa tempat dalam rangka menemukan sumber-sumber tersebut.

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Adapun beberapa tempat yang dikunjungi oleh penulis dalam mencari sumber-sumber sejarah adalah sebagai berikut:

#### 1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia

Pencarian sumber diawali dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Pencarian sumber tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2017. Penulis pun menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah sumber-sumber yang didapatkan di perpustakaan UPI Bandung:

- a. Buku karya Hari Poerwanto yang berjudul *Orang Cina Khek dari Singkawang*.
- b. Buku karya Andjarwati Nourdjanah yang berjudul *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*.
- c. Buku karya dari Leo Suryadinata yang berjudul *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*.
- d. Buku karya dari Jaffar Suryomenggolo yang berjudul *Hukum sebagai Alat Kekuasaan (Politik Asimilasi Orde Baru)*.
- e. Buku karya dari Mely G Tan dkk yang berjudul *Etnis Tionghoa di Indonesia; Kumpulan Tulisan*.
- f. Buku karya Koerniatmanto Soetoprawiro yang berjudul *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*.
- g. Buku karya Gouw Giok Siong yang berjudul *Warganegara dan Orang Asing (berikut peraturan-peraturan dan tjontoh-tjontoh)*.
- h. Buku karya Leo Suryadinata yang berjudul *Kebudayaan Minoritas Tionghoa*.
- i. Jurnal *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* yang memuat tulisan Ahmad Kosasih yang berjudul *Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional*.

#### 2. Perpustakaan Nasional

Selain mengunjungi beberapa instansi dan perpustakaan yang ada di Jawa barat, peneliti pun mengunjungi beberapa perpustakaan yang ada di Jakarta. Pada bulan Januari tahun 2017, penulis mencoba untuk mengumpulkan berbagai sumber di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang relevan dengan topik yang dikaji.

#### **Desi Darmayanti, 2018**

**DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

- a. Buku berjudul *Identitas Hibrid Orang Tionghoa* karya Darmawan.
- b. Buku berjudul *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia Buku 1* yang disusun oleh Badan Koordinasi Masalah Cina – BAKIN.
- c. Buku berjudul *Masalah Cina di Indonesia* yang ditulis WD Sukiman.
- d. Buku berjudul *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* karya Leo Suryadinata.
- e. Buku berjudul *Masalah Tionghoa di Indonesia: Asimilasi vs Integrasi* yang disunting oleh Yusuf Jahja.
- f. Buku berjudul *Tionghoa Indonesia dalam Krisis* karya Charles Coppel.
- g. Buku berjudul *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia* karya Suhandinata.

### 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Barat

Pada bulan Oktober 2017, penulis mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Barat. Pada kunjungan kali itu, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan, yakni:

- a. Buku berjudul *Tionghoa dalam Pusaran Politik* karya Benny G. Setiawan.
- b. Buku berjudul *Dilema Minoritas Tionghoa* karya Leo Suryadinata.
- c. Buku berjudul *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* karya Ong Hok Ham.
- d. Buku berjudul *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina* yang disunting oleh I. Wibowo.
- e. Buku berjudul *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis* yang dipublikasi oleh Penerbit Kompas.

### 4. Perpustakaan Kota Cimahi

Pada bulan Januari tahun 2017, penulis melakukan kunjungan ke Perpustakaan Cimahi. Dalam kunjungan tersebut, penulis menemukan sumber buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun sumber-sumber yang didapatkan adalah sebagai berikut:

#### **Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

- a. Buku berjudul *Tionghoa dalam Cengkraman SBKRI* karya Wahyu Effendi dan Prasetyadji.
- b. Buku berjudul *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas* karya Aimee Dawis.

#### 5. Arsip Nasional Republik Indonesia

Pencarian sumber pun tidak terbatas pada sumber tulisan berupa buku maupun jurnal saja, namun penulis pun mencoba untuk mencari arsip-arsip yang relevan dengan penelitian. Pada bulan Januari tahun 2017, penulis pun mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia. Adapun sumber arsip yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia milik Tjong Chian Min; 1971.
- b. Surat Permohonan Kewarganegaraan 1980 milik Hiu Pek Long.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 113 Tahun 1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Tjina.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1968 tentang Pembubaran SCUT.

#### 6. Perpustakaan Museum Konferensi Asia-Afrika

Pada bulan Oktober 2017, penulis mengunjungi Museum Konferensi Asia-Afrika untuk menambah sumber yang diperlukan. Pada kunjungan kali itu, penulis menemukan berbagai sumber yakni sebagai berikut:

- a. Buku berjudul *Beberapa Pemikiran Sekitar Ketahanan Nasional*.
- b. Buku berjudul *Connecting and Distancing: Southeast Asia and China* karya Ho Khai Leong.
- c. Buku berjudul *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* yang disusun oleh Jennifer Cushman dan Wang Gungwu.
- d. Buku berjudul *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina* karya Stuart W. Greif.

#### **Desi Darmayanti, 2018**

**DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

## 7. Perpustakaan Universitas Indonesia

Pada bulan November 2017, penulis dengan bantuan rekan yang berkuliah di UI, dapat mengakses buku-buku di perpustakaan UI yang relevan dengan penelitian, yakni:

- a. *Peraturan Perundang-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 1950-1996* yang dihimpun oleh Arif Djohan Tunggal.
- b. *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa* yang ditulis oleh B.P Paulus.
- c. *Menggugat SBKRI* yang disusun oleh Yayasan Pengkajian Jukum Indonesia (YPHI).

## 8. Koleksi Pribadi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak hanya menggunakan buku-buku yang didapatkan dari berbagai, perpustakaan tetapi peneliti pun menggunakan beberapa buku yang merupakan koleksi dari peneliti sendiri. berikut ini buku yang digunakan dalam penyusun tersebut :

- a. Buku berjudul *Kapok Jadi NonPri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan* yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dkk.
- b. Buku berjudul *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri* karya Afthonul Afif.
- c. Buku berjudul *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia* yang ditulis oleh Leo Suryadinata.
- d. Buku berjudul *Metodologi Sejarah* yang ditulis oleh Helius Sjamsuddin
- e. Buku berjudul *Sejarah Sebagai Ilmu dalam Wahana Pendidikan* yang ditulis oleh Ismaun.
- f. Buku berjudul *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* yang ditulis oleh Dadang Supardan.
- g. Buku berjudul *Mengerti Sejarah* karya Louis Gottschalk.

## 9. Internet

Sesuai dengan perkembangan zaman, sumber-sumber sejarah kini bisa diakses dalam bentuk *soft file*. Hanya dengan melakukan penelusuran (*browsing*) sesuai dengan kata kunci topik yang diinginkan,

**Desi Darmayanti, 2018**

**DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

kita bisa mencari dan mengunduh data yang diperlukan dari internet. Diperlukan kejelian dan kehati-hatian dalam memilih sumber yang akan digunakan untuk menghindari penggunaan data yang tidak kredibel. Berikut ini adalah beberapa sumber yang didapatkan hasil dari penelusuran di internet:

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: JB 3/4/12 tahun 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Buku berjudul *Himpunan Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan RI Buku 1* yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman.
- c. Buku berjudul *Kewarganegaraan Indonesia* oleh Soejono Hadidjojo.
- d. Buku berjudul *SBKRI Analisis dan Hasil Pemantauan* yang disusun oleh Wahyu Effendi dkk.
- e. Buku berjudul *SBKRI No Way: untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi* yang ditulis oleh Mega Christina.
- f. Jurnal berjudul *Kedudukan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) terhadap Hak WNI Keturunan Tionghoa Ditinjau dari Hukum Internasional* yang ditulis oleh Anggun Pratiwi dan Ni Made Suksma.
- g. Jurnal berjudul *Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Medan* yang ditulis oleh Agung Suharyanto
- h. Jurnal berjudul *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia* yang ditulis oleh May Lim Charity.
- i. Jurnal berjudul *Negara dan Minoritas Tionghoa* karya Leo Suryadinata.
- j. Jurnal berjudul *Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?* yang ditulis oleh Leo Suryadinata.
- k. Skripsi berjudul *Atlet bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia (1951-1978)* yang ditulis oleh Dien Anshara.
- l. Skripsi berjudul *Peran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) dalam Upaya Penghapusan Diskriminasi Institusional terhadap Warga Keturunan Tionghoa Tahun 2002-2006: Studi Kasus*

**Desi Darmayanti, 2018**

**DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

- Penghapusan Praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)* yang ditulis oleh Widyanita.
- m. Tesis berjudul *Gerakan Etnik Tionghoa Pasca Orde Baru: Prespektif Teori Gerakan Sosial Baru Alain Toraine* yang ditulis oleh Naning Mardiniah.
  - n. Tesis berjudul *Politik Hukum Pengaturan Kewarganegaraan (Tinjauan Yuridis terhadap Produk Hukum tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Orde Lama sampai dengan Era Reformasi)* yang ditulis oleh Sukman.
  - o. Tesis berjudul *Perkembangan Kebijakan Pemerintah Cina Mengenai Kewarganegaraan Etnis Cina di Asia Tenggara (1909-2000)* yang ditulis oleh Joanessa M.J.S Seda.
  - p. Tesis berjudul *Stereotip terhadap Tionghoa: Studi Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia* yang ditulis oleh Sukron Maksudi.
  - q. Disertasi berjudul *Perlindungan Hukum dari Diskriminasi Rasial di Indonesia pada Era Reformasi (Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa)* yang disusun oleh Hesti Armiwulan.

### 3.3.2 Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan berbagai macam sumber, maka penelitian pun bisa dilanjutkan ke dalam tahapan selanjutnya, yakni kritik sumber. Kritik sumber secara garis besar adalah proses menelaah berbagai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan secara kritis dan mendalam. Tujuan dari kritik sumber ini dikemukakan oleh Hugiono dan Poerwantana (1992, hlm. 32) sebagai “Suatu persyaratan untuk menggunakan sumber ini perlunya diuji dan dikoreksi dengan analisa kritis terhadap kesaksian dokumen-dokumen sezaman untuk menghindari dokumen yang palsu atau yang menyesatkan”. Secara garis besar, kritik sumber terbagi menjadi dua bagian, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

#### 3.3.2.1 Kritik Eksternal

Pada sumber sejarah yang primer belum ada turut campur tangan sejarawan di dalamnya. Dokumen (arsip) atau benda material terkait dengan peristiwa tertentu merupakan jejak masa lalu yang hadir apa

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

adanya (Hamid dan Madjid, 2011, hlm. 17). Dikarenakan pentingnya sumber primer dalam suatu penelitian sejarah, maka perlu dilakukan kritik eksternal terlebih dahulu untuk membuktikan keasliannya, yakni dengan menguji aspek-aspek ‘luar’ dari sumber tersebut. Sjamsuddin (2012) menjelaskan lebih lanjut:

Adapun maksud dari kritik eksternal adalah suatu penelitian atas asal-usul sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak (hlm. 105).

Berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya mengenai heuristik, penulis telah mengumpulkan beberapa sumber primer. Adapun sumber primer yang didapatkan itu berupa dokumen mengenai undang-undang kewarganegaraan juga sumber lain yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga dari berbagai lampiran pada buku-buku sumber dan internet.

Kritik eksternal yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber arsip ditujukan kepada Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: JB 3/4/12 tahun 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dikarenakan sumber ini didapatkan penulis dari internet, maka penulis pun melihat terlebih dahulu situs penyedia dokumen ini. Dokumen ini diunduh penulis dari situs <http://perpustakaan.bappenas.go.id>, yang merupakan situs resmi dari pemerintah. *File* ini diunduh dalam bentuk *pdf* berjumlah lima halaman yang merupakan hasil salinan dari dokumen asli. Kemudian, bila dilihat dari segi tulisannya, arsip ini sudah diketik rapi menggunakan mesin ketik sehingga dapat dibaca dengan jelas. Hasil *scan*-nya pun cukup rapi untuk menangkap keseluruhan dokumen, kecuali di halaman 4, dimana kertas ada dalam posisi sedikit miring. Namun, hal itu tidak mengganggu karena keseluruhan dokumen masih bisa dibaca. Dalam arsip ini juga dibubuhkan tanda tangan dari Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja dan tanda cap Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang-Undangan Departemen Kehakiman. Untuk membuktikan keaslian kontennya, penulis pun membandingkan isi

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

dokumen ini dengan lampiran yang terdapat pada buku-buku lain dan mendapati bahwa isi dokumen ini sama. Berdasarkan paparan di atas maka peneliti menilai bahwa secara eksternal sumber tersebut dapat dipercaya dan bisa dijadikan rujukan bagi penulisan skripsi.

Kritik eksternal selanjutnya penulis lakukan terhadap sumber arsip Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. Penulis mendapatkan arsip ini dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Jika dilihat secara fisik, kertas yang digunakan pada arsip tersebut sudah mulai menguning. Tulisan pada dokumen ini masih menggunakan ejaan lama, tapi dapat dibaca dengan baik karena penulisannya menggunakan mesin ketik. Dokumen ini juga ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Penulis menilai bahwa arsip ini adalah sumber yang dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Berikutnya, penulis melakukan kritik eksternal terhadap arsip Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 113 Tahun 1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Tjina. Penulis mendapatkan arsip ini dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dilihat dari segi materialnya, arsip ini masih dalam kondisi baik walaupun kertasnya sudah sedikit menguning. Penggunaan mesin ketik membuat tulisannya dapat dibaca dengan jelas sekalipun tulisan pada arsip ini masih menggunakan ejaan lama. Arsip ini juga ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Penulis menilai bahwa arsip ini bisa dipercaya dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian.

### **3.3.2.2 Kritik Internal**

Menurut Sjamsuddin (2012 hlm. 112) kritik internal merupakan "...pengujian terhadap sumber-sumber yang menekankan pada aspek isi (konten) dari sumber-sumber tersebut". Penelitian sejarah perlu melakukan kritik internal dikarenakan sumber informasi yang terdapat pada sumber sejarah, terutama sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, maupun penelitian yang merupakan hasil dari pemikiran sejarawan yang tentunya sebagai manusia pasti memiliki subyektivitas. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan Hugiono dan Poerwantana (1992, hlm. 26) bahwa "Sejarawan berusaha menyusun sejarah seobyektif mungkin, akan tetapi bagaimanapun obyektivitas diusahakan, obyektivitas itu akan tenggelam dalam subyektivitas, sebab untuk

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) |  
perpustakaan.upi.edu

dijadikan sejarah, obyek itu harus ditafsirkan oleh subyek.”. Maka dari itu, diperlukan kritik internal pada sumber sejarah untuk meminimalisasi subjektivitas dalam penelitian sejarah.

Dalam melakukan kritik internal, perlu juga dilakukan perbandingan atas berbagai sumber sejarah untuk mengecek kebenaran fakta dan rekonstruksi peristiwa sejarah yang disajikan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penyajian fakta dalam penelitian kita. Kritik internal juga diperlukan untuk mendekatkan peneliti pada fakta sejarah juga menghindari pemikiran yang satu arah saja. Hal serupa juga dikemukakan Hamid dan Madjid (2011) bahwa:

Berbeda dengan sumber primer, pada sumber sejarah yang sekunder campur tangan peneliti sejarah sudah ada campur tangan dalam memperlakukannya sebagai bahan sumber untuk rekonstruksi peristiwa masa lalu. Karena itu, pemahaman atau pengetahuan tentang peristiwa acapkali berbeda (multi-interpretasi), sekalipun itu mengenai satu peristiwa sejarah di tempat (spasial) dan waktu (temporal) yang sama (hlm. 17).

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kritik internal adalah membandingkan sumber yang digunakan dengan sumber-sumber lain, memeriksa sumber rujukan yang digunakan sumber tersebut, juga latar belakang penulis atau peneliti itu sendiri.

Salah satu contoh kritik internal yang dilakukan oleh penulis adalah yang dilakukan pada artikel yang dimuat pada situs hukumonline.com yang berjudul *Pejuang itu Berjuang Meraih SBKRI* dan ditulis pada 10 Mei 2003. Pada artikel ini, disebutkan bahwa (No Name, 2003) untuk pembuatan SBKRI “...Melalui calo, tarifnya bisa membengkak antara Rp. 1 juta hingga Rp. 20 juta...”. Informasi ini pada mulanya diragukan oleh penulis dikarenakan berasal dari internet dan tidak diketahui siapa penulisnya, dan darimana sumber yang digunakan. Maka, penulis pun mencoba membandingkan dengan sumber lain.

Sumber yang digunakan untuk perbandingan adalah buku *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia* karangan Suhandinata dan juga buku *SBKRI No Way: untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi* karya Christina. Ernawaty menyatakan

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

dalam Suhandinata (2009, hlm. 329) bahwa biaya untuk mengurus SBKRI yang dihabiskannya adalah “Memerlukan dana sepuluh juta rupiah (sekitar US \$1.150 dengan nilai tukar uang saat ini, 9 Juli 2002, US\$ = Rp8.700) untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut...”. Sedangkan, pengalaman tentang biaya pengurusan SBKRI yang membengkak juga diceritakan oleh Christina (2006) dalam bukunya yang berjudul SBKRI No Way, yakni;

Saat itu Papaku mengurus SK SBKRI untuk penulis dan adik penulis. Saat itu Papaku mengeluarkan uang Rp 1,5 juta. Dibandingkan dengan iuran sekolahku di SMA Negeri yang kurang dari Rp 10.000 per bulan, jelas uang sejumlah itu cukup bernilai. Setelah itu masih ada ongkos-ongkos lain yang memaksa Papaku merogoh saku, mengeluarkan uang tanpa kejelasan kapan keluarnya SBKRI adikku dan penulis. Menjelang penulis akan kuliah pada 1989, satu tahun setelah Papaku mulai mengurus SBKRI penulis, calo yang mengurus SBKRI itu minta lagi uang pelicin sampai Rp 1 juta per surat. Itu pun tetap berlarut-larut (hlm. 25).

Validitas informasi pada artikel yang berjudul *Pejuang itu Berjuang Meraih SBKRI* yang tersebut masih sedikit meragukan karena dari berbagai sumber bacaan yang didapatkan oleh penulis belum ditemukan biaya pembuatan SBKRI yang mencapai angka di Rp. 20 juta, namun benar adanya bahwa pembuatan SBKRI telah mencapai angka Rp.1 juta seperti yang dipaparkan oleh Christina. Maka, dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa sumber artikel itu masih layak untuk digunakan sebagai referensi karena memang mengandung fakta dimana dalam pembuatan SBKRI ini mengambil biaya antara sekitar 1 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.

### 3.3.3 Interpretasi

Setelah sumber-sumber tersebut diuji dan diverifikasi kembali melalui proses kritik eksternal dan internal, maka tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran atau interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut. Untuk melakukan interpretasi, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Kuntowijoyo (dalam

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Abdurrahman, 2007, hlm. 73) menjelaskan bahwa “Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi.” Dari berbagai sumber yang telah dihimpun oleh penulis, maka dilakukan intepretasi atas berbagai fakta sejarah yang ada untuk mengambil kesimpulan atas suatu peristiwa sejarah.

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berupaya menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial lain untuk membantu penelitian ini. Pendekatan interdisipliner dipilih dikarenakan untuk membahas suatu peristiwa sejarah, tentu tidak akan terlepas dari masyarakat yang terlibat di dalamnya, maka ilmu sejarah tidak bisa berdiri sendiri dalam membahasnya. Dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial lain, pembahasan mengenai peristiwa sejarah akan menjadi lebih utuh dikarenakan juga menyentuh sisi-sisi lain kehidupan masyarakat yang bersinggungan dengan peristiwa sejarah tersebut.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan ilmu hukum dan sosiologi untuk menopang penelitian penulis. *Pertama*, dengan digunakannya ilmu hukum sebagai ilmu bantu dalam penelitian ini membantu penulis untuk memahami bagaimana suatu produk hukum bisa memengaruhi kehidupan masyarakat. Contoh yang digunakan disini adalah bagaimana produk hukum berupa peraturan-peraturan mengenai kewarganegaraan. Dengan adanya perkembangan berbagai peraturan yang mengatur mengenai kewarganegaraan rupanya memberikan dampak tersendiri terhadap masyarakat. Adapun dalam penelitian ini digunakan juga konsep-konsep berkaitan dengan kewarganegaraan misalnya warga negara, kewarganegaraan ganda, naturalisasi, dan sebagainya. Salah satu contoh interpretasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan konsep warga negara adalah bagaimana fenomena untuk mendapatkan SBKRI yang membuat Etnis Tionghoa rela membayar calo mahal-mahal dikarenakan adalah adanya urgensi dari Etnis Tionghoa untuk segera dapat ‘diakui’ menjadi warga negara. Dengan kepemilikan SBKRI yang menghapuskan keraguan atas status kewarganegaraan Etnis Tionghoa, maka Etnis Tionghoa pun bisa menikmati hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia lainnya, misalnya kemudahan dalam pemenuhan dokumen administratif.

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

*Kedua*, penulis menggunakan sosiologi sebagai salah satu ilmu bantu dalam mengkaji penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti meminjam konsep stereotip dan diskriminasi untuk membuat berbagai interpretasi. Misalnya, penulis menginterpretasi bahwa salah satu alasan membengkaknya tarif pembuatan SBKRI adalah dikarenakan adanya stereotip masyarakat, birokrat juga para calo bahwa Etnis Tionghoa ini memiliki status ekonomi yang di atas rata-rata. Namun, tidak semua Etnis Tionghoa terdapat pada golongan tersebut, misalnya Masyarakat Cina Benteng yang kesulitan untuk membuat SBKRI karena terkendala masalah biaya.

Sesuai pemaparan di atas, maka penggunaan ilmu sosial lain dalam penelitian ini mempermudah penulis dalam menginterpretasikan data-data dan fakta serta fenomena yang ada sehingga menjadikan pemahaman suatu peristiwa sejarah menjadi semakin utuh.

### 3.3.4 Historiografi

Historiografi adalah suatu tahapan akhir dari metode penelitian sejarah. Menurut Ismaun (2005 hlm. 28-29) historiografi adalah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi satu kisah yang jelas dalam bentuk tulisan. Pada tahapan ini, seorang sejarawan harus menuangkan segala interpretasi yang ada ke dalam bentuk tulisan.

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi (Sjamsuddin, 2012, hlm. 121).

Historiografi dapat mengambil berbagai macam bentuk karya ilmiah, salah satunya skripsi. Penulisan skripsi ini secara sistematis disusun merujuk kepada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2016. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa sistematika penulisan skripsi

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

dibagi menjadi lima bab yaitu, bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metode penelitian, bab IV pembahasan dan bab V Simpulan dan rekomendasi.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penulis menyusun skripsi tentang “Dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa (1978-2006)”. Dalam bab ini terdapat juga rumusan masalah yakni batasan materi yang akan dibahas dalam skripsi, tujuan dan manfaat penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini akan berisi tentang penjelasan literatur-literatur yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat berbagai konsep yang digunakan penulis sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah atau historis yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Bab IV Kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa. Bab ini akan berisi pembahasan mengenai perkembangan kebijakan status kewarganegaraan Etnis Tionghoa di Indonesia, penerapan kebijakan SBKRI 1978-2006 dan dampaknya kepada Etnis Tionghoa.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi penulis tentang inti pembahasan. selain itu dikemukakan juga pula rekomendasi dari hasil penelitian ini.

**Desi Darmayanti, 2018**

*DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu